



BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jateng
gayeng

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**LKjIP
2021**

**MBOTEN KORUPSI
MBOTEN NGAPUSI**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	5
1.4 Landasan Hukum.....	6
1.5 Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Rencana Kinerja	10
2.3 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Analisis Capaian Kinerja	16
3.3 Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	24
4.2 Rekomendasi.....	24
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Pejabat Struktural	3
Tabel 1.2 : Daftar Kepangkatan	4
Tabel 1.3 : Tingkat Pendidikan Pegawai	4
Tabel 1.4 : Sarana Prasarana	5
Tabel 2.1 : Rencana Strategis	9
Tabel 2.2 : Tujuan dan Target Kinerja	10
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja	12
Tabel 2.4 : Program dan Kegiatan	13
Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Kinerja LkjIP	16
Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran I	17
Tabel 3.3 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran II	18
Tabel 3.4 : Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 1	20
Tabel 3.5 : Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 2	21
Tabel 3.6 : Realisasi Anggaran	23

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Dinas / Badan	3
---	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Semarang, Februari 2022

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan di Biro Administrasi Pembangunan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah menetapkan Visi dan Misi selama lima tahun (2018-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan melalui Renstra Sekretariat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 ditetapkan tujuan dan kemudian dirumuskan sasaran sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 tersebut dan Perjanjian Kinerja tahun 2021, maka pada laporan ini akan disajikan pelaporan kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui *performance gap* yang nantinya akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini juga disampaikan kepada masyarakat agar dapat diketahui, dipahami dan dimanfaatkan lebih lanjut oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa kedudukan Biro Administrasi Pembangunan Daerah berada dibawah Sekretariat Daerah

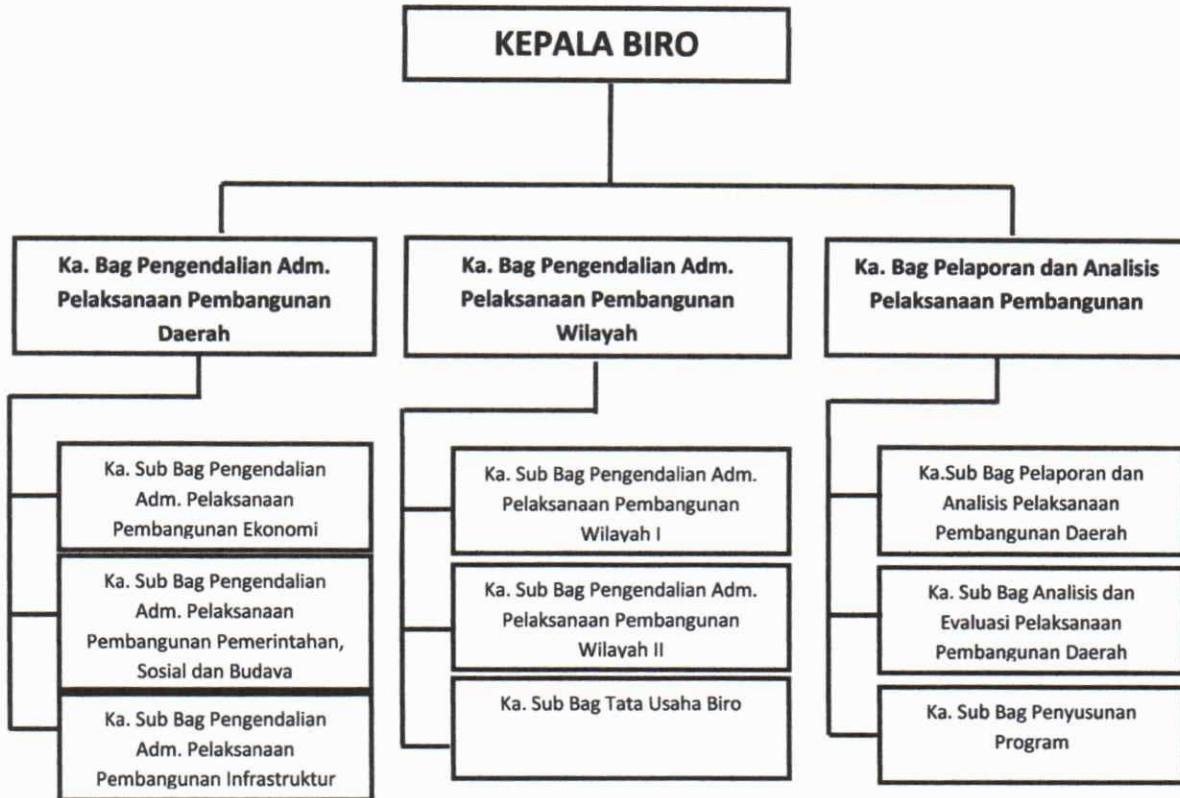
Provinsi Jawa Tengah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Biro Administrasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tupoksinya, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah dipimpin oleh Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - c. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
3. Bagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.

Gambar 1.1
BAGAN ORGANISASI
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
(Pergub Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018)



Jumlah personalia di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pejabat Struktural
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II.b	1 Orang
2	Eselon III.a	3 Orang
3	Eselon IV.a	9 Orang
Total		13 Orang

Tabel 1.2
Daftar Kepangkatan Pegawai
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	
1	Pembina Utama Muda	1	Orang
2	Pembina Tk. I (IV/b)	3	Orang
3	Pembina (IV/a)	7	Orang
4	Penata Tk. I (III/d)	5	Orang
5	Penata (III/c)	7	Orang
6	Penata Md Tk. I (III/b)	4	Orang
7	Penata Muda (III/a)	2	Orang
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1	Orang
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	Orang
10	Pengatur Muda (II/a)	1	Orang
Total		32	Orang

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan Pegawai
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

No	Pendidikan	Jumlah	
1	Sarjana Strata 2	17	Orang
2	Sarjana Strata 1	10	Orang
3	SLTA/ sederajat	3	Orang
4	SLTP/ sederajat	1	Orang
5	SD	1	Orang
Total		32	Orang

Selain itu, disamping adanya dukungan dari 32 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Administrasi Pembangunan Daerah juga didukung oleh bantuan tenaga non PNS sebanyak 10 (sepuluh) orang. Sedangkan dari segi sarana dan prasarana, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Administrasi Pembangunan Daerah didukung dengan adanya beberapa aset sebagai berikut:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah
1	Ruang Rapat	3 Ruang
2	Mesin Komputer	34 Unit
3	Printer	20 Unit
4	Laptop	5 Unit
5	Mesin telepon/fax	1 Unit
6	LCD	3 Unit
7	TV	2 Unit

2.1 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Berdasarkan tupoksi tersebut diatas, maka Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi strategis yaitu melakukan: peningkatan terhadap keterpaduan dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan wilayah serta pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

Adapun permasalahan utama Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jateng yang harus diselesaikan dalam rangka pengendalian kinerja OPD Pemerintah dan penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Terjadi lonjakan kasus covid-19 sejak awal tahun 2021 yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan beberapa program dan kegiatan antara lain dengan adanya kebijakan pemberlakuan PPKM dan *work from home*.
2. Penyesuaian APBD dan pembatasan belanja sesuai dengan SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0003693 tanggal 6 April 2021 dalam bentuk *refocusing* anggaran kurang lebih hampir 50% pagu awal.
3. Terjadinya penundaan kegiatan yang bersumber dari DAK non-fisik karena adanya perubahan juknis pelaksanaan sehingga berpotensi menyebabkan proses lelang DAK bidang pendidikan tertunda penyaluran Tahap I nya.
4. Adanya kendala pada kegiatan hibah/bansos karena revisi Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang hibah/bansos belum terbit.

2.2 Landasan Hukum

1. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
3. Pergub Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
4. Pergub Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
5. Pergub Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.3 Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang perlunya LkjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang landasan hukum penyusunan LkjIP dan isu strategis, serta keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula informasi terkait gambaran umum Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, antara lain meliputi tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, SDM serta sarana dan prasarana.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini memuat penjabaran tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dengan target kinerja yang spesifik dan terukur sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat penjelasan kinerja program dan kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV Penutup

Bab ini memuat simpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan di Biro Administrasi Pembangunan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah menetapkan Visi dan Misi selama lima tahun (2018-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun visinya adalah : "Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Untuk mewujudkan Visi tersebut telah dituangkan kedalam empat (4) misi, yaitu sebagai berikut: membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI; memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota; mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru; menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Maka, melalui Renstra Sekretariat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 ditetapkan tujuan "Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah" sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya dirumuskan 3 (tiga) sasaran yaitu: meningkatnya sinergitas kebijakan Daerah, meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1
Rencana Strategis
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase kebijakan yang efektif	80%	81%	82%	83%	84%
	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	80%	81%	82%	83%	84%
Sasaran I Meningkatnya sinergitas kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85%	85%	85%	85%	85%
Sasaran II Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	80%	82%	83%	84%	85%
	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	80%	82%	83%	84%	85%

	Efektivitas pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	80%	81%	82%	83%	84%
	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Aset yang dievaluasi	85%	85%	85%	85%	85%

2.2 Rencana Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 berikut sasaran dan target kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

Tabel 2.2
Tujuan dan Target Kinerja tahun 2021
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2021
Tujuan	Persentase kebijakan yang efektif	82%
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	82%

Sasaran I Meningkatnya sinergitas kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85%
Sasaran II Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	83%
	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	83%
	Efektivitas pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	82%
	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Aset yang dievaluasi	85%

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Sekretaris Daerah untuk mewujudkan target kinerja tahun 2021.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	85
2	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	83
		Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	83
		Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	82
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Perekonomian Pembangunan			Rp 1.623.000.000
	Kegiatan 1 Evaluasi Administrasi Pembangunan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	1	Rp 1.623.000.000
		Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target	83%	
		Persentase pelaksanaan DAK sesuai target	86%	
		Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target	83%	
		Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	1	
		Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	81%	

		Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	84%	
		Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu	12	
		Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD	12	
		Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset	1	
		Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur	1	
		Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	87%	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 424.959.000
	Kegiatan 1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda	1	Rp 132.000.000

		Jumlah laporan evaluasi Setda	1	
	Kegiatan 2 Administrasi Umum	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12	Rp 292.959.000
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12	
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan *progress* kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, setidaknya terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2021, yaitu:

a. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya sinergitas kebijakan Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

TUJUAN/ SASARAN	2021		%TINGKAT CAPAIAN 2021	TARGET AKHIR RENSTRA	%TINGKAT CAPAIAN TERHADAP RENSTRA
	TARGET	REALISASI			
Tujuan: Meningkatkan efektivitas manajemen Pemerintahan Daerah					
Persentase kebijakan yang efektif	82	92.05	112.26	82	112.26
Sasaran I: Meningkatnya sinergitas kebijakan Daerah					
Persentase rekomendasi kebijakan bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, wilayah, pelaporan dan analisis yang terealisasi	85	100	117.65	85	117.65

Sumber : e-Controlling Kinerja Provinsi Jawa Tengah

Capaian kinerja sasaran **meningkatnya sinergitas kebijakan Daerah** melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase rekomendasi kebijakan bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, wilayah, pelaporan dan analisis

yang terealisasi dengan rata rata tingkat capaian 117.65% dan masuk dalam kategori **SANGAT BAIK.**

b. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

TUJUAN/SASARAN	2021		%TINGKAT CAPAIAN 2021	TARGET AKHIR RENSTRA	%TINGKAT CAPAIAN TERHADAP RENSTRA
	TARGET	REALISASI			
Tujuan: Meningkatkan efektivitas manajemen Pemerintahan Daerah					
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	82	83.77	102.16	82	102.16
Sasaran 2: Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
Efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	83	99.14	119.45	85	116.64
Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	83	100	120.48	85	117.65
Efektivitas pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	82	100	121.95	84	119.05

Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Aset yang dievaluasi	85	85.71	100.84	85	100.84
Rata-Rata Tingkat Capaian terhadap Renstra					113.55

Sumber : e-Controlling Kinerja Provinsi Jawa Tengah

Capaian kinerja sasaran **meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah** melalui 4 (empat) indikator yaitu efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah, persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota, efektivitas pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan serta persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset yang dievaluasi dengan rata-rata tingkat capaian 113.55% dan masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Adapun tercapainya target kinerja sasaran bisa melampaui target akhir renstra karena adanya optimalisasi dalam pelaksanaan kegiatan didukung oleh adanya sistem aplikasi yang strategis sehingga memungkinkan penyelesaian pekerjaan secara lebih efektif dan efisien.

Disamping itu, pencapaian sasaran tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan daerah dan program peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
2. Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah
3. Kegiatan Analisis Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4. Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jateng
5. Kegiatan Pemantauan dan Pemanfaatan Evaluasi DAK di Jateng

6. Kegiatan Peningkatan Efektivitas Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran
7. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jadi secara keseluruhan dari 2 (dua) sasaran Biro yaitu meningkatnya sinergitas kebijakan daerah dan meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah masuk dalam kategori **SANGAT BAIK** dengan capaian sebesar 115.6%

Tabel 3.4
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 1
Tahun Anggaran 2019-2021

Tujuan/ Sasaran	2019 (%)			2020 (%)			2021 (%)		
	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian
Tujuan : Meningkatkan efektivitas manajemen Pemerintahan Daerah									
Persentase kebijakan yang efektif	80	93.02	116.28	80	86.68	107.60	82	92.05	112.26
Sasaran 1: Meningkatnya sinergitas kebijakan Daerah									
Persentase rekomendasi kebijakan bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, wilayah, pelaporan dan analisis yang terealisasi	85	100	117.65	85	100	117.65	85	100	117.65

Tabel 3.5
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 2
Tahun Anggaran 2019-2021

Tujuan/ Sasaran	2019 (%)			2020 (%)			2021 (%)		
	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian
Tujuan : Meningkatkan efektivitas manajemen Pemerintahan Daerah									
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	86.36	107.95	75	83.13	110.84	82	83.77	102.16
Sasaran 2: Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
Efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	80	81	101.25	75	99.47	132.63	85	99.14	119.45
Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	80	96.6	120.75	82	99	120.73	83	100	120.48
Efektivitas pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	80	95.63	119.54	81	85.13	105.10	82	100	121.95

Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Aset yang dievaluasi	80	85.71	100.84	71	85.71	120.72	85	85.71	100.84
---	----	-------	--------	----	-------	--------	----	-------	--------

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2021, didukung dengan Anggaran sebesar sebesar Rp 4.320.000.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan. Namun pada triwulan II tahun anggaran berjalan, terdapat *refocusing* anggaran sebesar Rp 2.272.041.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat puluh satu ribu rupiah) sehingga terjadi pergeseran pagu definitif menjadi Rp 2.047.959.000,- (dua milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran TA 2021

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)
Program Perekonomian Pembangunan	Evaluasi Administrasi Pembangunan	1.623.000.000	1.597.504.654	100
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	292.959.000	275.687.897	100
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.000.000	122.241.000	100
Jumlah		2.047.959.000	1.995.433.551	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan pada tahun anggaran 2021 realisasi anggaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah sebesar Rp 1.995.433.551,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dari pagu awal sebesar Rp 2.047.959.000,- (dua milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Dengan Capaian fisik keseluruhan mencapai 100% (target terpenuhi) dan masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 52.525.449,- (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) atau terjadi efisiensi sebesar 2,56%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan seluruhnya dalam kategori **SANGAT BAIK**. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yang berada pada nilai 115.6%.

Capaian kinerja sasaran **meningkatnya sinergitas kebijakan Daerah** melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase rekomendasi kebijakan bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, wilayah, pelaporan dan analisis yang terealisasi dengan rata-rata tingkat capaian 117.65% dan masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Capaian kinerja sasaran **meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah** melalui 4 (empat) indikator yaitu efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah, persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota, efektivitas pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan serta persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset yang dievaluasi dengan rata-rata tingkat capaian 113.55% dan masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.

4.2 Rekomendasi

Pelaksanaan kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 memang masih terbentur dengan adanya beberapa kendala. Dari kendala tersebut telah kami evaluasi dan tetapkan langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja kedepannya, meliputi:

1. Menjalankan program kegiatan tahun 2022 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran Covid 19.
2. Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama yang sinergis dengan instansi terkait dan mitra kerja dapat ditingkatkan.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat atau *user* baik melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur maupun sarana dan prasarana penunjang.

4. Melaksanakan inovasi/ terobosan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui program dan kegiatan yang inovatif.
5. Melakukan evaluasi dan perbaikan sistem perencanaan dengan memanfaatkan data kinerja yang ada agar perencanaan program kegiatan ke .depan lebih efektif dan efisien.
6. Meningkatkan koordinasi internal Biro yang lebih efektif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

Semarang, Februari 2022
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah



Endi Faiz Effendi, S.Pi, MA
Pembina Tingkat I
NIP. 19710009 199603 1 006